



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IRWAN SULUK PADANG
NIK : 7210021207760001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 2 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : IRWAN SULUK PADANG
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
- NHK : 794435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	190.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m ² /36 m ² di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.243.139
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	216.743.139

III. HUTANG Rp. 232.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -16.056.861

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

